

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Branding Politik Dedi Mulyadi dalam Membangun Citra Humanis melalui Media Sosial Instagram @dedimulyadi71, yang dilakukan menggunakan pendekatan netnografi dengan teknik observasi, dokumentasi, wawancara, dan analisis menggunakan Python, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Branding politik Dedi Mulyadi melalui akun Instagram @dedimulyadi71 dilakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi politik yang menampilkan berbagai aktivitas pemerintahan, pelayanan masyarakat, implementasi kebijakan, serta interaksi langsung dengan masyarakat. Strategi tersebut diwujudkan melalui unggahan yang mengangkat isu pendidikan, lingkungan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga respons terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan hasil analisis konten dan komentar dengan menggunakan Python, konten yang menampilkan interaksi langsung dengan masyarakat memperoleh tingkat keterlibatan (*engagement*) yang tinggi melalui jumlah *likes*, sedangkan konten mengenai kebijakan memiliki jangkauan *views* yang lebih luas. Alih-alih hanya bereaksi secara pasif, analisis *word cloud* menunjukkan bagaimana audiens membentuk komunitas digital yang secara aktif merefleksikan citra humanis Dedi Mulyadi. Hal ini membuktikan bahwa branding Dedi Mulyadi telah berhasil diterima dan dipahami oleh audiens di ranah digital, ini bukan sekadar kesuksesan konten semata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Instagram dimanfaatkan tidak hanya sebagai media publikasi kegiatan pemerintah, tetapi juga sebagai media branding politik yang mampu membangun hubungan komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.
2. Branding politik yang dilakukan Dedi Mulyadi melalui Instagram berhasil membentuk citra humanis melalui penyampaian kebijakan yang

dikombinasikan dengan pendekatan populisme digital. Hal tersebut terlihat dari konsistensi unggahan yang memperlihatkan kehadiran Dedi Mulyadi dalam menangani berbagai persoalan masyarakat secara langsung, seperti peninjauan Sungai Citarum, evaluasi pelayanan Samsat, penanganan siswa yang bolos sekolah, pembangunan fasilitas publik, dialog dengan buruh, hingga interaksi dengan masyarakat dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Penyajian konten tersebut membangun persepsi bahwa Dedi Mulyadi merupakan sosok pemimpin yang dekat, responsif, mudah dijangkau, dan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Praktik tersebut sekaligus mencerminkan penerapan populisme digital, yaitu penggunaan media sosial untuk memperlihatkan kedekatan antara pemimpin dan masyarakat melalui komunikasi yang bersifat langsung, personal, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan publik. Dengan demikian, Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun serta memperkuat citra humanis Dedi Mulyadi di ruang digital.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

V.2.1 Saran Akademis

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai branding politik dan populisme digital dengan menggunakan objek penelitian maupun platform media sosial yang berbeda, seperti TikTok, YouTube, atau X. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan strategi branding politik beberapa kepala daerah atau tokoh politik sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas media sosial dalam membentuk citra politik di era digital.

V.2.2 Saran Praktis

Bagi politisi maupun pejabat publik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi branding politik di media sosial akan lebih efektif apabila dilakukan secara

konsisten melalui penyampaian informasi kebijakan yang disertai tindakan nyata, komunikasi yang terbuka, serta interaksi langsung dengan masyarakat. Penyampaian konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan menunjukkan penyelesaian terhadap persoalan publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus membangun citra politik yang positif. Namun demikian, penggunaan media sosial juga perlu tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan antara penyampaian citra dengan pelaksanaan kinerja yang nyata agar kepercayaan publik dapat dipertahankan secara berkelanjutan.